

ISSN 2086-7050

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Volume 26, nomor 3, Juli-September 2013



Stereotipe, dampak, dan perlindungan hukum bagi SPG (Sales Promotion Girl)

Tumbuh-kembang anak laki-laki usia pra-puber rentan terhadap pengaruh lingkungan

Pembangunan nasional: Kearifan lokal sebagai sarana dan target *community building* untuk komunitas Ammatoa

Folklore rejang pada kelompok etnik Serawai di Provinsi Bengkulu

Dinamika gerakan petani di Organisasi Serikat Petani Lampung

SK Akreditasi (B) No. 81/DIKTI/Kep/2011, Tanggal 15 November 2011

11

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : *Dinamika Gerakan Petani di Organisasi Serikat Petani Lampung (The Dynamics of Farmer's Movements in the Peasants Union Organization in Lampung)*

Penulis : Dr. Hartoyo, M.Si

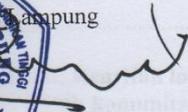
Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Publikasi : Jurnal Akreditasi : "Masyarakat, Kebudayaan dan Politik",
SK Akreditasi (B) No. 81/DIKTI/Kep/2011 Tanggal 15 November 2011.
Volume 26, Nomor 3, Juli – September 2013, Halaman 193-202

Penerbit : Universitas Airlangga Surabaya

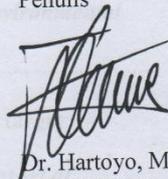
Bandar Lampung, 18 September 2018

Mengetahui
Dekan SIP
Universitas Lampung



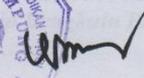
Dr. Syarif Mahya, M.Si
NIP. 199008031986031003

Penulis



Dr. Hartoyo, M. Si.
NIP 19601208 198902 1 001

Menyetujui
Ketua LPPM
Universitas Lampung



Warsono, Ph.D
NIP. 196302161987031003

Volume 26 No. 3, Juli-September 2013

ISSN 2086-7050

Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Merupakan terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan di bidang sosial, yang berkaitan dengan masyarakat, kebudayaan, dan politik; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pimpinan Umum
Basis Susilo

Pimpinan Redaksi
Siti Mas'udah

Redaksi Pelaksana
Helmy Prasetyo, Arum Budiastuti, Jurianto, Philipus Keban,
Dessy Harisanty, Moordiati, Priamiy Devita, M. Nuringtyas

Alamat Redaksi:
Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik
Jl. Dharmawangsa Dalam (Timur Perpustakaan Kampus B),
Surabaya 60286, Indonesia.
Telephone: 031 5017429,
E-mail: mkpsurabaya@gmail.com

Mitra Bebestari:
Prof. L. Dyson, Prof. Suryanto, Prof. Yusuf Irianto,
Prof. Ramlan Surbakti, Prof. Peter Suwarno,
Prof. Joseph Glinka, Prof. M. Henneberg, Dr. R. Ida, Prof. I. Hendrarti,
Prof. Mustain, Prof. Hotman Siahaan, Prof. Wirawan, Dr. Budi Prasetyo,
Prof. Widjaya Martokusumo, Dr. Makmur Keliat

Dicetak oleh Airlangga University Press RK 312/09.14/AUP-B4E
Kampus C UNAIR, Mulyorejo, Surabaya 60115
Telepon: 031 5992246, E-mail: aup.unair@gmail.com

Stereotipe, dampak, dan perlindungan hukum bagi SPG
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

**Stereotype, dampak, dan perlindungan hukum bagi SPG
 (Sales Promotion Girl)**
Stereotype, effects, and law protection for SPG (Sales Promotion Girl)
 Laura Hardjaloka 137-152

**Tumbuh-kembang anak laki-laki usia pra-puber rentan terhadap
 pengaruh lingkungan**
*Growth and development of pre-pubertal boys are prone to environmental
 factors*
 Myrtati D. Artaria 153-166

**Pembangunan nasional: Kearifan lokal sebagai sarana dan target
 community building untuk komunitas Ammatoa**
*National development: Local wisdom as the instrument and target of
 community building for the Ammatoans*
 Samsul Maarif, Asman Azis, & Palupi Setiani 167-181

Folklore rejang pada kelompok etnik Serawai di Provinsi Bengkulu
Folklore Rejang on Serawai ethnic group in Bengkulu Province
 Sarwit Sarwono dan Agus Joko Purwadi 182-192

Dinamika gerakan petani di Organisasi Serikat Petani Lampung
*The Dynamics of farmers' movements in the Peasants Union Organization
 in Lampung*
 Hartoyo 193-202

Dinamika gerakan petani di Organisasi Serikat Petani Lampung

The Dynamics of farmers' movements in the Peasants Union Organization in Lampung

Hartoyo

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Jalan Soemantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng, Lampung, Indonesia.
Email: htyiluh@yahoo.co.id

Abstract

This research studied the internal dynamics of peasant movement organization in the struggle for the peasants. The dynamics of the organization's internal network structure of the movement became the focus of analysis by not ignoring the important role of external resources and political opportunities. Data were collected through in-depth interviews, recording, observation, and documentation. Source data obtained from NGOs, SPL, academics, activists, and peasants. There were 45 informants from 7 locations. The study found that, first, the proper functioning of the organization over the peasant movement was determined by the degree of social capital in the early phase in response to the momentum of political opportunities. Secondly, the condition of post-movement organizations do collective actions of peasants immediately dysfunction (disoriented), that weakened the capacity of leadership and organizational structure. Internal conflict and fragmentation of the organization associated with the attitude of the actor's strategic movement into moderate, pragmatic and commodified resource mobilization. Third, consequence of the above process in motion organizational stagnation, and was unable to institutionalize substantive interests of peasants as the main goal of the movement.

Keywords: *internal dynamic, movement, organization, peasant*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan dinamika internal organisasi gerakan petani dalam memperjuangkan nasib petani. Dinamika struktur jejaring internal organisasi gerakan menjadi fokus analisis dengan tidak mengabaikan peran penting sumberdaya eksternal dan peluang politik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, perekaman, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari LSM, SPL, akademisi, aktivis gerakan, dan petani. Informan berjumlah 45 orang, dari 7 lokasi. Hasil penelitian menemukan bahwa, *pertama*, berfungsinya organisasi gerakan petani lebih ditentukan oleh derajat modal sosial pada fase awal dalam merespon momentum peluang politik. *Kedua*, kondisi organisasi gerakan pasca aksi-aksi kolektif petani segera mengalami disfungsi (disorientasi) yang memperlemah kapasitas kepemimpinan dan struktur organisasionalnya. Konflik internal dan fragmentasi organisasi berjalan seiring dengan sikap para aktor strategis gerakan menjadi moderat, pragmatis dan mengkomodifikasikan sumberdaya mobilisasi. *Ketiga*, proses tersebut berkonsekuensi pada stagnasi organisasi, sehingga tidak mampu melembagakan kepentingan substantif petani sebagai tujuan utama gerakan.

Kata kunci: *dinamika internal, organisasi gerakan, petani*

Pendahuluan

Gerakan-gerakan petani terorganisir yang marak terjadi pada awal reformasi memiliki realitas dan dinamika tersendiri. Fenomena tersebut sebagai bagian dari era kebangkitan kesadaran baru masyarakat sipil sejalan dengan tumbanganya kekuatan rezim Orde Baru. Di Lampung juga berkembang organisasi gerakan petani skala provinsi, seperti Dewan Tani Lampung (DTL), Ikatan Petani Lampung (IPL), Serikat Petani Lampung (SPL), dan Mirak Nadai (MN). Mereka memiliki anggota organisasi petani basis dan berjejaring dengan organisasi gerakan petani skala nasional dan bahkan transnasional.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena eksis pada skala provinsi; lingkup gerakannya semakin luas dan terbuka; entitasnya terus berubah; berada pada lingkungan sosial, politik dan kultural tersendiri; memiliki struktur, kualitas dan kapasitas sumberdaya mobilisasi yang berbeda. Artinya, gerakan tersebut memiliki lingkup, kekuatan dan dinamikanya sendiri berbeda dengan gerakan-gerakan petani yang terjadi pada beberapa episode kekuasaan rezim sebelumnya. Sesuai dengan pandangan McAdam, McCarthy dan Zald (1996:154-159) berkembangnya gerakan petani tersebut tidak terlepas dari saling keterkaitan antara tiga faktor utama, yakni peluang politik, mobilisasi sumberdaya, dan framing kolektif.

Terdapat perbedaan penekanan terhadap pentingnya organisasi di dalam menjelaskan dinamika gerakan sosial. Teori perilaku kolektif mengabaikan kerangka kerja organisasional dalam menganalisis dinamika gerakan sosial, dan sebaliknya teori mobilisasi sumberdaya memosisikan organisasi gerakan sosial sebagai salah satu faktor determinan, selain faktor-faktor eksternal (seperti tekanan struktural, birokrasi, dan peluang politik). Akan tetapi, teori tersebut kurang mampu menjelaskan sejauh mana dinamika gerakan sosial ditentukan oleh peranan internal organisasi (McAdam dan Snow 1997:91).

Meskipun dibedakan antara informal dan formal, organisasi gerakan sosial klasik lebih informal, sangat bergantung pada kekuatan mobilisasi konstituen "penerima manfaat", dan secara umum berkembang sejalan dengan meningkatnya sumber dana (McAdam dan Snow 1997:421). Realitasnya organisasi gerakan banyak yang berada pada garis kontinum formal dan informal. Dinamikanya tidak terlepas dari dimensi ruang dan waktu, konteks dan situasi, struktur dan relasi. Dalam mencapai tujuannya mengalami pasang surut dan berjalan pada siklusnya (Harper 1989:147).

Menurut Taylor (McAdam dan Snow 1997:409), peluang politik dan basis organisasi lokal sebagai faktor utama gerakan sosial. Akan tetapi, kesuksesannya dapat menjadi awal munculnya situasi konfliktual yang mengarah pada fragmentasi organisasi akibat berperannya *free-riders*. Gerakan sosial dapat terperangkap dalam tindakan kooptasi dan kembali mengalami tekanan internal dan eksternal. Ketika eksistensinya tidak lagi terintegrasi sebagai kekuatan sosial yang sehat, maka gerakannya akan menurun, mati suri, bahkan berada pada titik kematian.

Pentingnya beragam faktor internal dalam memahami dinamika gerakan sosial sudah dikaji oleh beberapa ahli. Zald dan Ash (Harper 1989:150) dan Turner dan Killian (1987) menguji faktor organisasional, faksionalisasi, karakteristik kepemimpinan, transformasi gerakan, dan pola kontrol sosial. Lebih jauh McAdam, McCarthy dan Zald (1996:152-157) melihat arah perkembangan gerakan sosial *subcultural* dan *countercultural* ke dalam empat jalur utama, yakni institusionalisasi, komersialisasi, involusi, radikalisisasi.

Gerakan-gerakan sosial di Indonesia pada era reformasi, khususnya perlawanan masyarakat lokal (terutama petani) terhadap negara dan swasta sudah dikaji dengan fokus perhatian, teori dan metodologi yang beragam (Ngadisah 2003, Wahyudi 2005, Dewi 2006, Silaen 2006, Mustain 2007). Beberapa kajian tersebut masih kurang jelas memfokuskan analisisnya pada dinamika internal organisasi gerakan skala provinsi, terutama dilihat dari kekuatan modal sosial yang dimanfaatkan oleh para aktor untuk merealisasikan kepentingannya (Coleman 1990:305).

Modal sosial berhubungan dengan keberlangsungan gerakan sosial dalam membangun ikatan sosial ke dalam dan ke luar. Ketika para aktor melakukan gerakan sosial dalam merespon peluang politik, maka hubungan di antara mereka diorganisir dalam suatu jejaring sosial. Pada tataran mikrostruktural, pentingnya jejaring dalam gerakan sosial terletak pada ikatan-ikatan sosial instrumental dilihat dari sisi kepentingan para aktor. Argumen ini menekankan pentingnya jejaring sosial di dalam mempertahankan dan memperluas gerakan sosial. Tarrow

(1994:59-60) menekankan pentingnya kekuatan jejaring dan ikatan-ikatan di antara berbagai kelompok sosial yang beragam di dalam dinamika organisasi gerakan sosial guna merespon peluang politik tersebut.

Pentingnya keterkaitan antara jejaring sosial dengan organisasi gerakan sosial, berkembang sebagai reaksi terhadap gagasan lama tentang perilaku kolektif yang mengabaikan kekuatan integrasi sosial. Gerakan sosial hanya mungkin jika para individu terintegrasi dalam jejaring sosial dan dimobilisir melalui organisasi formal. Kepentingan pribadi itu sendiri tidak cukup menjadi motivasi tindakan kolektif, dan tindakan kolektif hanya dapat terjadi jika masalah “*free riders*” dapat diatasi dengan integrasi sosial (Biggs 2006).

Masalahnya organisasi gerakan petani skala provinsi di Provinsi Lampung yang berkembang pesat di awal era reformasi pada saat ini kapasitasnya sebagai gerakan *countercultural* semakin menurun dan berubah sebagai gerakan *countercultural*. Titik utama jawaban atas persoalan tersebut dapat dijelaskan dari dinamika internal organisasi. Kajian ini bertujuan, *pertama*, menjelaskan fungsi utama organisasi gerakan petani dalam memperjuangkan nasib petani. *Kedua*, menjelaskan konsekuensi formalisasi organisasi gerakan petani dengan menganalisis pengaruhnya terhadap dinamika kepemimpinan dan kapasitas struktur organisasionalnya. *Ketiga*, menjelaskan berbagai konsekuensi pola kepemimpinan dan struktur organisasi gerakan dalam mencapai tujuannya. Ketiga tujuan tersebut menjadi fokus analisis dengan menggunakan pendekatan modal sosial, meskipun tidak mengabaikan peran penting sumberdaya eksternal dan perkembangan peluang politik.

Metode

Studi kasus terhadap SPL secara khusus dipilih, karena memiliki beberapa karakteristik khusus. *Pertama*, sebagai organisasi gerakan petani skala provinsi. *Kedua*, secara formal dibentuk lebih dulu tidak didasarkan pada kekuatan petani basis. *Ketiga*, kepemimpinan terdiri dari dua kelompok aktor strategis petani dan non petani (kalangan intelektual). *Keempat*, sejak berdiri berjejaring kuat dengan organisasi gerakan petani nasional. *Kelima*, memperluas keanggotaan petani basis pada wilayah tanpa konflik pertanahan. *Keenam*, berkembang lebih dinamis dibandingkan dengan organisasi gerakan petani lainnya.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi, perekaman, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari aktivis LSM, SPL, akademisi, aktivis gerakan petani, dan petani basis. Informan berjumlah 45 orang berasal dari 7 lokasi basis. Selain itu juga diwawancarai 3 orang dari LSM, 5 orang pengurus inti SPL, 3 orang akademisi, dan 6 aktifis gerakan petani. Dalam pengumpulan dan analisis data dilakukan proses dialogis antara peneliti dengan tineliti. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa dinamika internal SPL sebagai hasil kerja pengalaman praktis dan pembingkaiannya para aktor, sehingga di dalamnya melibatkan berbagai proses pemaknaan subyektif dan intersubyektif. Menurut Alberto Milucci (Kriesi1988:350), gerakan sosial merupakan hasil dari proses konstruksi sosial atas realitas. Dinamika internal organisasi gerakan sosial tidak “*given*” dan deterministik, tetapi lebih dilihat berada pada kontrol kesadaran aktif aktor, merupakan tampilan hasil dari proses konstruksi yang terkait dengan persepsi, orientasi, pilihan-pilihan, dalam membaca peluang politik dan dalam mengatasi hambatan-hambatan.

Hasil dan Pembahasan

Fungsi SPL sebagai organisasi gerakan *countercultural*

SPL yang dibentuk tanggal 9 Desember 1998 memiliki karakter sebagai organisasi gerakan sosiopolitik, dan dalam jangka panjang dikemas sebagai organisasi gerakan sosio-kultural. Kelahirannya dibidani oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang disatukan dalam wadah

korsorsium. Kepemimpinan bersifat voluntaristik dan struktur organisasinya agak hirarkhis, semi formal, tidak eksklusif, dan memiliki keanggotaan kolektif petani sebagai basisnya.

SPL sebagai organisasi gerakan *countercultural* pada fase awal berhasil melakukan aksi-aksi kolektif non-institusional guna mempengaruhi kebijakan agraria. Dalam jangka panjang, gerakannya bertujuan merubah tatanan agraria yang mendasar dan lebih baik, yakni terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam penguasaan sumberdaya agraria. Keberadaannya diyakini dapat berperan menjadi bagian dari kekuatan kontrol sosiopolitik terhadap negara.

Para partisipan intelektual berposisi sebagai aktor strategis gerakan yang mendominasi dalam kepemimpinan inti. Para tokoh petani berposisi sebagai pemimpin tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan beberapa organisasi petani basis. Derajat *trust* konstituen terhadap SPL pada fase awal gerakan sangat tinggi, karena hubungan antar aktor masih terikat kuat oleh nilai kebersamaan, komitmen moral dan semangat perjuangan yang tinggi.

Eksistensi SPL memenuhi unsur-unsur utama sebagai sebuah organisasi gerakan sosial dilihat dari beberapa aspeknya, seperti sebab gerakan, tujuan dan sasaran, strategi, ideologi atau kepercayaan, keanggotaan, kepemimpinan, struktur organisasi dan efek gerakan (Landsberger 1984:36-37, dan Lofland 1996:99). Dibandingkan dengan gerakan-gerakan petani yang terjadi sebelumnya, seperti dalam gerakan tradisional (*collective behavior*), maka SPL memiliki bangunan organisasi yang lebih terstruktur dan kompleks. Sejak awal berdiri berjejaring dengan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI). Secara normatif karakteristiknya dikemas cenderung tampil sebagai organisasi gerakan sosial moderen, yang bukan hanya berbasis pada tujuan material tetapi juga *postmaterial*.

Membangun infrastruktur organisasi gerakan petani dalam merespon peluang politik reformasi cukup mudah, karena di tingkat petani basis sudah terbentuk sub kultur oposisi petani, yaitu realitas sosio-kultural yang termanifestasikan dalam pandangan, sikap dan perilaku melawan dominasi agraria. Sub kultur oposisi ini melekat di dalam *schemata* petani yang diproduksi secara aktif di dalam ruang-ruang interaksi dan terjadi selama konflik berlangsung. Di dalamnya sudah ada kesadaran oposisional petani tetapi masih berada pada derajat kesadaran konfliktual belum sampai pada kesadaran politik. Sumberdaya mobilisasi potensial semakin diaktifkan, karena di kalangan petani sudah terjadi “mobilisasi konsensus”, yaitu upaya-upaya sengaja untuk secara bersama-sama siap melakukan mobilisasi dalam aksi-aksi kolektif. Kesadaran sosiopolitik petani muncul setelah mendapatkan injeksi ideologi gerakan dari para aktor intelektual.

Kekuatan struktur sumberdaya mobilisasi termanifestasikan dalam derajat kekuatan jejaring antar elemen aktor petani dan non petani. Terbukanya peluang politik cepat direspon petani untuk berpartisipasi menjadi anggota organisasi dan dalam melakukan aksi-aksi kolektif. Hadirnya organisasi gerakan petani menjadi determinan dalam mempercepat rekrutmen anggota secara kolektif, terutama terhadap petani basis konflik pertanahan. Dalam mempercepat perluasan jejaring di tingkat petani basis digunakan strategi “*block recruitment*”, yakni keanggotaan kolektif dikelompokkan berdasarkan lokasi komunitas petani basis dalam suatu wilayah kabupaten. Strategi ini digunakan untuk lebih memudahkan kontrol jejaring organisasional, proses pengorganisasian, dan membangun konsensus. Hal ini berarti bahwa solidaritas sosial dan komitmen awal antar anggota menyediakan dasar bagi berlakunya insentif kolektif. Strategi “*block recruitment*” dengan derajat solidaritas sosial tinggi dalam struktur sumberdaya mobilisasi menjadi tipikal dari kesuksesan organisasi gerakan petani dalam melakukan gerakan *countercultural*.

Keberhasilan aksi-aksi kolektif petani pada fase awal gerakan ternyata tidak sepenuhnya dapat dilihat pada pertimbangan untung-rugi berdasarkan asumsi rasionalitas material. Dasar pertimbangan tersebut sulit digunakan untuk menjelaskan motivasi partisipasi, karena dapat

mereduksi persoalan gerakan ke dalam motivasi untuk memperoleh insentif selektif. Keunggulan utama pada fase awal gerakan adalah insentif moral atau purposif yang dapat ditawarkan untuk mencapai keberhasilan dalam aksi-aksi kolektifnya.

Jadi, secara umum fungsi SPL sebagai gerakan *countercultural* yang optimal pada fase awal gerakan terletak pada kemampuannya dalam membuat konfigurasi antara empat faktor utama yang saling terkait, yaitu sub kultur oposisi petani, mobilisasi sumberdaya, peluang politik dan proses *framing*. Dengan terbukanya peluang politik maka sub kultur oposisi petani berfungsi mempercepat respon positif dalam membangun struktur sumberdaya mobilisasi. Faktor-faktor tersebut berjalan melalui *framing* kolektif yang segera dapat ditransformasikan ke dalam aksi-aksi kolektif petani. Isu-isu kritis agraria (“*injustice frame*”) yang dikemas dalam paket ideologi egalitarian atau neo-populis dengan mudah diinjeksikan dan didesiminasikan, karena sesuai kepentingan dan pengalaman praktis petani. Kemampuan dalam membuat konfigurasi dari keempat faktor utama tersebut yang memosisikan SPL berada pada derajat kepercayaan tinggi.

Konsekuensi formalisasi SPL terhadap kapasitas kepemimpinan dan struktur organisasionalnya

Eksistensi SPL yang sejak berdirinya sudah diformalkan, oleh banyak pihak diragukan akan mampu bertahan dalam melakkan gerakan *countercultural*. Salah satu kelemahannya tidak didukung oleh kualitas sumberdaya yang memadai dan modal sosial yang kuat. Kekhawatiran tersebut terbukti, setelah enam bulan berjalan sudah mengalami stagnasi, lemah dalam kepemimpinan. *Pertama*, pemilihan kepemimpinan inti tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang, masih uji-coba dan tergesa-gesa guna merespon peluang politik. *Kedua*, ketuanya dipilih dari kalangan petani, tetapi diposisikan sebagai pemimpin terkooptasi. *Ketiga*, semangat juang dan komitmen moral para aktor strategis gerakan yang labil dan kurang koordinasi.

Perubahan kepemimpinan kedua pada bulan Juni 1999 melalui Musyawarah Luar Biasa, tidak melalui Kongres. Pada periode ini juga tidak berjalan mulus. Norma-norma jejaring yang terwujud dalam bangunan solidaritas sosial dan komitmen moral semakin mencair, bahkan terjadi benturan dalam pengambilan keputusan tentang strategi dan formasi aksi. Manajemen organisasi bergerak kurang sehat dan berakumulasi dalam situasi konfliktual. Para aktor strategis gerakan mulai terkonsentrasi pada kepentingan pragmatis dan diduga terjadi penyimpangan kepentingan, sehingga berkembang *distrust* petani basis terhadap kepemimpinan inti.

Perubahan kepemimpinan ketiga pada tahun 2001 dilakukan hanya melalui rapat terbatas oleh sebagian kecil aktor strategisnya. Motivasinya cenderung merespon peluang politik lokal dan komodifikasi sumberdaya mobilisasi. Proses tersebut dianggap sebagai tindakan “*kudeta*”. Kekuatan jejaring internal seperti itu lebih bersifat cair dan sementara. Seperangkat hubungan terkoneksi tidak lagi didasari ikatan solidaritas dan semangat juang yang memadai. Proses tersebut kurang memahami makna substantifnya bahwa derajat kekuatan kolektif dapat ditingkatkan melalui strategi kooperasi.

Dinamika SPL tersebut ada yang tidak sesuai dengan teori linier dan teori “*life cycle*” atau “*natural history*” (Harper 1989:147). Kedua teori tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa perkembangan gerakan sosial semakin lama semakin melekat pada sistem sosial yang berlaku dan akhirnya menjadi gerakan konservatif dalam suatu bentuk struktur yang permanen. Realitasnya, *pertama*, tujuan gerakan petani belum tercapai dan belum terlembagakan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil yang legal. *Kedua*, sebagai proses perkembangan struktural dan pelembagaan yang sedang berlangsung, gerakan yang dilakukan belum mampu mengakomodasikan tujuan-tujuannya dan berkompromi dengan perkembangan tuntutan sistem politik dan kultural. *Ketiga*, perkembangannya diwarnai konflik-konflik internal antar kelompok aktor strategis yang berimbas pada perpecahan di tingkat organisasi petani basis.

Terbukanya struktur peluang politik ternyata tidak cukup menjadi prasyarat utama berkembangnya gerakan *countercultural*, sebagaimana diyakini oleh para teoritis struktural. Peluang politik tidak hanya cukup dilihat dalam dimensi obyektif dan deterministik, tetapi juga bersifat situasional subyektif sesuai dengan definisi situasi oleh para aktor strategis gerakan dalam melihat perkembangan peluang politik. Perbedaan struktur skemata aktor dalam memahami hakekat perjuangan petani menyebabkan terjadinya perbedaan dalam merespon peluang politik dan dalam mengatasi hambatan, sehingga terdapat perbedaan pemahaman terhadap gerakan, kalkulasi keuntungan dan resiko yang akan diperoleh.

Oleh karena itu, posisi peluang politik dalam dinamika internal SPL lebih tampak bersifat persepsional daripada sebagai sesuatu yang *given* (struktural). Pasca aksi-aksi kolektif petani segera terjadi pergeseran substansi atas realitas peluang politik yang mengarah pada persoalan makna terhadap yang dipikirkan dan dirasakan. Perkembangan kekuatan SPL sebagai gerakan *countercultural* memuncak tahun 2002 sejalan dengan puncak *trust* atau legitimasi konstituen. Setelah itu, kapasitasnya semakin melemah sampai saat ini, meskipun peluang politik relatif masih terbuka. Dari argumen-argumen yang dibangun menunjukkan telah terjadi pergeseran makna gerakan bahwa aksi massa petani sudah tidak lagi menjadi strategi utama. Sementara itu, isu-isu kritis dan strategi gerakan yang baru sudah tidak diproduksi lagi. Kemandulan SPL semakin nyata ketika petani basis kembali menghadapi ancaman atas penguasaan lahan oleh pihak-pihak lain.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, dasar pertimbangan untung-rugi secara material relevan untuk menjelaskan dinamika internal SPL pasca puncak gerakan, karena kepentingan pragmatis para aktor strategis gerakan semakin jelas muncul ke permukaan. Fenomena elitis tersebut merupakan indikasi perubahan drastis sikap partisipatif mereka dari "*result from motivation*" menjadi sebagai pelembagaan yang mendasari motivasi partisipasi. Artinya, sikap dan partisipasi bukan merupakan konsekuensi dari motivasinya untuk mencapai tujuan strategis gerakan, tetapi menjadi sebab yang mendasari motivasi untuk mencapai kepentingan pragmatisnya. Konsekuensinya tujuan strategis gerakan semakin berjarak dengan tujuan instrumental (praktis), sehingga akar gerakan (petani basis) semakin tercerabut dari batang tubuhnya (organisasi gerakan petani). Suatu hal yang logis ketika tujuan instrumental yang semakin dibuat berjarak dengan tujuan strategisnya berdampak pada semakin melemahnya soliditas perjuangan. Pada situasi tersebut kepentingan pragmatis justru menjadi faktor pemicu dalam mengarahkan dinamika internal organisasi gerakan menjadi kurang terintegrasi dalam melakukan gerakan *countercultural*.

Indikasinya dapat dilihat dari, *pertama*, terjadi pergeseran dasar orientasi tindakan yang semula terkonsentrasi pada pencapaian kepentingan "substansif" petani berubah menjadi berbasis pada "potensi", yakni kekuatan petani basis yang dapat dimobilisir untuk mencapai kepentingan pragmatis yang menyimpang dari tujuan strategis gerakan. *Kedua*, ternyata insentif selektif material tidak hanya dinikmati oleh para kontributor tetapi juga oleh banyak non-kontributor yang semakin tidak terkontrol. *Ketiga*, proses tersebut berjalan seiring dengan menurunnya solidaritas sosial dan komitmen moral kelompok.

Solidaritas sosial, komitmen moral dan insentif purposif berdimensi kolektif sangat penting bagi keberlangsungan gerakan karena mengandung peleburan antara kepentingan personal dan kolektif. Realitasnya tindakan para aktor strategis gerakan justru semakin berjarak dengan tujuan strategis gerakan itu sendiri. Sesuai dengan pandangan Paradakis (1988:440), karakter keanggotaan pada situasi seperti itu menjadi tidak terlembagakan.

Situasi tersebut rentan terjadi konflik internal, karena kontradiksi dan konflik cenderung berjalan berdampingan. Karena kepentingan terkait dengan *power*, maka konflik internal organisasi gerakan berada pada kendali para aktor strategisnya. Konflik internal organisasi

sebagai proses reproduksi tindakan di antara kelompok aktor strategisnya dengan derajat ketidaksesuaian pencapaian kepentingan dan tidak pernah berada pada suatu titik temu. Sikap dan perilaku tersebut menjadi sebab melemahnya kapasitas kepemimpinan dan struktur organisasi yang mengarah pada kesalahan konsekuensi utama, yakni melemahkan derajat integrasi jejaring internal dalam mencapai tujuannya.

Kesalahan konsekuensi lebih jauh adalah terjadi fragmentasi organisasi. Sebagian besar petani basis anggotanya keluar dan bergabung membentuk organisasi gerakan petani baru bernama Mirak Nadai. Realitas ini berimplikasi sebagai faktor penghambat keberlanjutan gerakan petani. Formalisasi organisasi gerakan yang didukung oleh sikap dan perilaku para aktor strategis seperti itu justru kontraproduktif dengan makna memperjuangkan nasib petani. Fragmentasi organisasi semakin menggiring kekuatan jejaring internal berada pada situasi disintegratif. Akibatnya, sumberdaya mobilisasi menjadi terbelah dan tersusun atas sempalan-sempalan beberapa kelompok aktor strategis gerakan yang masing-masing memiliki semangat korporatismenya sendiri. Arah perjuangan masing-masing berbeda dan saling mengklaim kepemilikan atas petani basis. Organisasi gerakan dan petani basis menjadi terjebak dalam tindakan komodifikasi, sebagai sumberdaya mobilisasi untuk mencapai kepentingan pragmatis mereka.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dinamika internal organisasi gerakan petani semakin mengarah sebagai ajang kontestasi kepentingan para elit aktor dalam merespon peluang politik lokal guna berebut sumberdaya mobilisasi. Konflik internal dan fragmentasi organisasi berjalan seiring dengan semakin lemahnya hubungan simbiosis-mutualisme antar elemen aktor, karena gagal dalam melembagakan kepentingan petani basis melalui reproduksi organisasi gerakan. Klaim kekuatan organisasional dengan ukuran jumlah anggota, sebenarnya berada pada medan strukturasi para aktor strategis gerakan dan memperkuat hubungan antagonis. Konflik internal terjadi selain karena lemahnya kinerja kepemimpinan juga terkait dengan persoalan perbedaan garis perjuangan di antara kelompok aktor yang dipaksakan berlaku atau dapat mengendalikan ketika menduduki posisi strategis di dalam struktur organisasi gerakan.

Konflik internal yang semakin terakumulasi juga menunjukkan bahwa di antara para elit aktornya kurang mampu menjalin komunikasi dialogis secara efektif. Ikatan solidaritas sosial semakin mengendur dan masing-masing pihak saling melihat kelemahan pihak lain dalam menyelesaikan setiap persoalan organisasi dan kepemimpinan yang dihadapi. Lebih jauh, masing-masing pihak saling memperkuat pengaruhnya baik terhadap kekuatan organisasi gerakan maupun terhadap massa petani basis. Pada titik ini kapasitas jejaring internal dan komitmen para aktor strategis gerakan semakin lemah di dalam mengendalikan arah organisasi gerakan.

Menjelang Pemilu 2004 kekuatan SPL kembali dibangkitkan oleh sebagian aktor strategis karena dianggap masih memiliki banyak sumberdaya petani basis dan memiliki hubungan historis perjuangan. Kekuatan sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik dalam merespon peluang politik lokal. Mereka melakukan perubahan kepemimpinan, tetapi tidak tampak sebagai inovasi strategi perjuangan petani melalui jalur institusional, melainkan tetap ditujukan untuk mencapai kepentingan pragmatis. Upaya tersebut gagal dan mengalami *distrust* oleh petani basis. SPL kembali dibiarkan dalam kondisi kritis, dan FSPI tidak dapat melakukan intervensi langsung karena model jejaring masih federatif.

Ketika SPL berubah menjadi Serikat Petani Indonesia Wilayah Lampung (SPI-Lampung) pada akhir tahun 2007 mengikuti model unitarian, maka rekrutmen anggota dibuka secara personal. Upaya pelembagaan program-program gerakan semakin nyata diarahkan untuk dapat masuk pada jalur institusional, sehingga petani yang menjadi basis massa SPL secara potensial dapat menjadi sumberdaya mobilisasi partai politik yang akan dibentuk (Ichsan Malik, 2004). Proses

tersebut merubah karakternya dari gerakan *countercultural* menjadi gerakan konsensus. Karakter gerakan petani seperti itu telah mengalami moderasi yang diarahkan oleh para aktor strategisnya masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Giddens (2005:216) memperingatkan bahwa pada situasi seperti itu para aktor strategis gerakan bisa samar dalam melihat kedalaman intervensi pihak lain yang sebenarnya ikut ambil bagian dalam menyeret ke arah yang mungkin dapat melemahkan posisi gerakan petani itu sendiri.

Konsekuensi kepemimpinan dan struktur SPL terhadap pencapaian tujuan organisasional

Semakin melemahnya kondisi organisasi gerakan merupakan gejala umum di Lampung. Terbukanya situasi politik tidak berhubungan dengan menguatnya kapasitas gerakan *countercultural*, bahkan dengan melembaganya tujuan gerakan. Isu-isu kritis petani pada skala lokal tidak mengalami inovasi, justru yang menguat adalah isu-isu global dan abstrak.

Isu-isu global yang abstrak tersebut diproduksi oleh organisasi gerakan transnasional yang kemudian mengalami penetrasi pada aras nasional. Isu-isu strategis tersebut tidak dapat diterjemahkan pada konteks lokal dalam menjawab berbagai persoalan praktis yang secara nyata dihadapi petani basis. Kondisi nyata yang mereka dihadapi bukan hanya *asset reform* tetapi juga *access reform* dan jawabannya adalah pemberdayaan ekonomi, politik dan kultural. Iklim kebebasan pada aras nasional masih tidak bebas dari tekanan-tekanan pada aras lokal.

Merubah model unitarian dalam merespon perkembangan situasi politik dianggap bisa memperkuat kapasitas kepemimpinan dan struktur organisasi gerakan. Model tersebut dalam beberapa hal menguntungkan bagi pengembangan organisasi gerakan petani di Lampung. *Pertama*, muncul semangat baru bagi anggota di tingkat basis dan elit organisasi. *Kedua*, membuka peluang bagi anggota untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam struktur kepemimpinan. *Ketiga*, dalam batas tertentu organisasi tingkat wilayah dapat berhubungan langsung dengan organisasi pusat dan permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan melibatkan kewenangan organisasi pusat. *Keempat*, perubahan tersebut bersifat mendasar dan baru, serta membuka peluang lebih luas sebagai organisasi karir. Dalam prospek pengembangan karir politik, terbuka peluang bagi para kader untuk memasuki posisi-posisi politik sesuai dengan dinamika politik lokal dan nasional.

Pada sisi lain yang lebih kongkrit, model unitarian cenderung memiliki ciri-ciri sebagai organisasi kemasyarakatan. Model organisasi gerakan seperti ini cenderung akomodatif dalam mencapai tujuannya, dan perubahan tersebut masih sebatas menjawab kebutuhan penguatan kapasitas internal organisasi. Perubahan tersebut mengarahkan kepemimpinan inti lebih memperhatikan eksistensi organisasi daripada sebagai organisasi gerakan *countercultural*. Pada konteks adaptasi terhadap sistem politik dan sosio-kultural dominan, maka perhatian terhadap kapasitas organisasionalnya, sesuai pandangan Weber dan Michels, cenderung bersifat "*accommodationist*" (Harper 1989). Aspek dinamisnya tidak terlepas dari keterkaitan antara nilai-nilai perjuangan, konstituen, dan sumber dana. Keterkaitan dengan nilai-nilai perjuangan dan konstituennya menyangkut pemberdayaan, memperhatikan misi dan kerjanya, sedangkan terkait dengan sumber dana merupakan hubungan instrumental tetapi menyangkut kelangsungan hidup organisasi (Kilby 2004:4).

Pada sisi lain, disinyalir bahwa perubahan menjadi unitarian sebagai strategi para elit aktor pusat untuk tetap melanggengkan kekuasaan (posisinya), sedangkan anggota jejaring di daerah hanya sebagai alat legitimasi. Perubahan yang bersifat mendasar tersebut berarti merubah bentuk dan wajah baru organisasi gerakan petani. Pada kondisi ini memungkinkan para elit aktor lama yang menduduki posisi utama dalam struktur kepengurusan FSPI yang secara organisatris sudah seharusnya berakhir dapat mencalonkan diri lagi untuk menduduki posisi utama dalam kepengurusan yang baru (SPI). Dugaan ini terbukti dengan terpilihnya kembali ketua SPI yang dulunya menjadi ketua FSPI.

Praktek kepemimpinan dan perubahan struktur organisasional menjadi SPI-Lampung semakin tidak mampu menampilkan karakternya sebagai organisasi gerakan dalam memperjuangkan nasib petani. Meskipun sudah diarahkan pada organisasi karir, kekuatan dan perkembangan jejaring internalnya masih jauh dari memenuhi beberapa kriteria utama sebagai organisasi gerakan masyarakat sipil yang berada pada garis massa petani, yakni otonomi, swadaya, swasembada, legitimasi, dan kredibilitas (Miller dan Covey 2005, Culla 2006). *Pertama*, tetap tidak mampu mengembangkan diri, mengambil keputusan sendiri dan juga dalam mengelola dan mengatur diri sendiri secara bebas. Kedua, tidak mampu meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan tertentu berdasarkan prakarsa sendiri disertai kemampuan memobilisasi sumberdaya materi sendiri. *Ketiga*, belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan sumberdaya yang dimiliki. *Keempat*, eksistensinya semakin samar siapa saja massa petani yang secara nyata menjadi anggotanya dan kembali mengalami *distrust* oleh petani basis yang diklaim sebagai anggotanya. *Kelima*, hubungan dengan konstituennya semakin berjarak, jumlah konstituen secara nyata semakin mengecil, dan tanggung jawab kepemimpinan terhadap konstituennya semakin melemah.

Bahkan menurut kriteria yang ditawarkan Hardiyanto dan Wiradi (2001) eksistensinya hingga saat ini belum banyak menampilkan karakternya sebagai organisasi gerakan petani dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi, kepemimpinan, kemandirian, garis massa, kritik-otokritik, kesatuan dan persatuan. Hubungan simbiosis-mutualisme dalam jejaring internal sangat tergantung pada kapasitas kepemimpinan dan struktur organisasi yang direpresentasikan oleh para aktor strategisnya dalam setiap praktek organisasionalnya yang konsisten pada garis ideologi perjuangan petani. Tetapi, tindakan mereka masih sulit mengarah pada pola hubungan tersebut, dan karena itu konsekuensi dari tindakannya masih jauh dari kemungkinan mencapai tujuan semula. Struktur jejaring, sikap dan perilaku politik yang diproduksi dalam ruang dan waktu masih belum konsisten dengan ideologi perjuangan dalam melakukan perubahan tatanan agraria yang mendasar dan lebih baik. Kondisi tersebut yang menyebabkan tujuan memperoleh sumberdaya politik dan ekonomi yang diupayakan melalui tindakan-tindakan strategis masih jauh dari harapan.

Simpulan

Fungsi organisasi gerakan petani skala provinsi ditentukan oleh strategi gerakan dan struktur jejaring antar elemen aktor. Derajat konsensus terhadap makna substantif gerakan berhubungan dengan derajat modal sosial. Properti struktural sistem jejaring fungsional dapat diefektifkan selama nilai-nilai dan norma-norma kolektif serta derajat kepercayaan dapat dipertahankan. Inovasi strategi terjadi selama organisasi gerakan sebagai oposisi aktif dalam melakukan gerakan *countercultural*. Aksi-aksi kolektif petani dapat dilakukan karena berfungsinya secara simultan antara sub kultur oposisi petani, mobilisasi sumberdaya, peluang politik dan proses *framing*. Semua itu terjadi pada fase awal hingga puncak gerakan selama lima tahun pertama.

Meskipun pada tataran normatif karakteristiknya dikemas cenderung tampil sebagai organisasi gerakan moderen, tetapi pada tataran praksis belum berfungsi maksimal dalam gerakan pembaruan agraria. Formalisasi organisasi gerakan cenderung berpengaruh negatif terhadap dinamika kepemimpinan dan struktur organisasionalnya. Pasca puncak gerakan, derajat ikatan formal yang dibangun semakin melemah, sehingga tidak mampu mengontrol tindakan-tindakan para aktor strategis untuk selalu terarah pada tujuan sebagai gerakan *countercultural*. Nilai-nilai dan norma gerakan semakin mencair dan mengalami *distrust* oleh petani basis. Dinamika internal organisasi dipengaruhi oleh beragam jejaring informal dan interaksinya banyak diwarnai oleh perilaku konfliktual. Hubungan afeksi dimapilulasi di dalam kontestasi antar kelompok aktor strategisnya untuk mencapai *interest* dan *power* masing-masing. Terjadi penguatan sikap moderasi dan komodifikasi sumberdaya mobilisasi dalam dinamika kepemimpinan dan struktur organisasi gerakan petani untuk mencapai kepentingan pragmatis.

Dinamika kepemimpinan dan struktur jejaring formal berpengaruh terhadap derajat pencapaian tujuan gerakan. Upaya revitalisasi modal sosial tetap tidak mampu meningkatkan derajat hubungan afeksi antar elemen aktor yang semakin memudar. Proses disintegrasi berjalan seiring dengan proses pembusukan dari dalam dan penyumbatan dari luar. Karakter semula sebagai gerakan *countercultural* berubah menjadi gerakan *subcultural* dan cenderung diarahkan pada jalur institusional. Proses tersebut sejalan dengan tindakan-tindakan aktor strategis gerakan yang kontraproduktif, sehingga terjadi stagnasi organisasi dan semakin tidak mampu melembagakan tujuan substantif dari perjuangan petani.

Daftar Pustaka

- Biggs M (2006) Social Networks, Movement Organizations, and Collective Protest: The 1960 Sit-ins in the American South. ESRC Social Capital Seminar, University of Nottingham, 8 December 2006. Diakses dari [http://www.socialcapital/seminars.comBiggs 1.pdf.pdf](http://www.socialcapital/seminars.comBiggs%201.pdf.pdf)., tanggal 7 Juni 2007.
- Coleman JS (1990) Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Culla AS (2006) Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi LSM di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Dewi O (2006) Resistensi Petani terhadap Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus Perlawanan Petani Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit PTPN XIII (Persero) PIR V Ngabang, Di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jakarta: Universitas Indonesia. Disertasi.
- Giddens A (2005) Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hardiyanto A dan Wiradi G (2001) Land Reform Berdasarkan Inisiatif Rakyat. Seri Panduan Organisasi Tani Jilid I. Bandung: Konsorsium Pembaharuan Agraria.
- Harper CL (1989) Exploring Social Change. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Kilby P (2004) Accountability for empowerment: Dilemmas facing non-governmental organizations. Asia Pacific School of Economics and Government, The Australian National University. <http://www.apseg.anu.edu.au>.
- Kriesi H (1988) The Interdependence of Structure and Action: Some Reflections on the State of the Art. JAI Press Inc.
- Landsberger HA dan Alexandrov YG (1984) Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial. Jakarta: CV. Rajawali.
- Lofland J (1996) Social Movement Organizations: Guide to Research on Insurgent Realities. New York: Aldine de Gruyter
- Malik I (2004) Pasang surut LSM di Indonesia. Dalam: Menyuarakan Nurasi Menggapai Kesetaraan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- McAdam D, McCarthy JD, dan Zald MN (1996) Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. USA: Cambridge University Press.
- McAdam D dan Snow DA (1997) Social Movements: Reading on The Emergence, Mobilization, and Dynamics. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company.
- Miller V dan Covey J (1997) Advocacy Sourcebook: Framework for Planning, Action and Reflection. Institute for Development Research. Diterjemahkan oleh Hermoyo. Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mustain (2007) Petani vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ngadisah (2003) Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Paradakis E (1988) Social movements, self-limiting radicalism and the green party in West Germany. Sociology. Vol.22. No.3: 433-454.
- Silaen V (2006) Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir: Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: IRE Press.
- Tarrow S (1994) Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
- Turner RH, and Killian LM (1987) Collective Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Wahyudi (2005) Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan. Malang: UMM Press.